

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Januari 2022 menandai 1 tahun dan 9 bulan telah berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam situasi global sampai saat ini per tanggal 11 Januari 2022, *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa terdapat 311.510.975 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 5.515.327 kasus kematian karena COVID-19 (WHO, 2021a). Di Indonesia, sejak kasus pertama yang diumumkan pada Maret 2020, terdapat 4.266.649 kasus yang dikonfirmasi, dengan jumlah kematian sebesar 144.136 dan *case fatality rate* (CFR) atau tingkat kematian kasus nasional sebesar 3,4% (WHO, 2021b).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan adanya program vaksinasi yang disuntikkan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021 di Istana Negara yang kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat per 11 Januari 2022, total 171.445.921 (82,32%) orang telah berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 dengan mendapatkan vaksin dosis pertama dan total 117.650.566 (56,49%) untuk dosis kedua dari berbagai jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia (Kemenkes RI, 2022). Secara keseluruhan cakupan vaksinasi untuk dosis pertama sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 70%, namun masih terdapat

beberapa wilayah di Indonesia yang cakupan vaksinasinya belum mencapai target agar dapat memenuhi kekebalan komunitas atau *herd immunity*.

Adanya kebijakan dan program mengenai vaksinasi, pemerintah mulai menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan program vaksinasi COVID-19 sehingga menciptakan kerja sama antara pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Partisipasi ini ada dalam banyak bentuk, salah satunya adalah dengan memberikan opini pada ruang publik mengenai kebijakan dan program vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketersediaan ruang publik memfasilitasi masyarakat dalam pertukaran argumentasi untuk meningkatkan kadar partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif atau hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan. Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna jika partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif (Mariana, 2015).

Perkembangan teknologi komunikasi dan kemajuan dalam teknologi informasi memberikan warna baru bagi bentuk komunikasi publik dalam kehidupan demokrasi di berbagai negara. Terhitung dari Januari 2021, Hootsuite dan We Are Social mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau sekitar 73,7% penduduk Indonesia. Angka ini meningkat sebesar 15,5% dibandingkan dengan tahun 2020 (Hootsuite : We are Social, 2021). Sedangkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa persebaran jumlah pengguna internet pada tahun 2019 hingga 2020 paling banyak pada

wilayah di Pulau Jawa dengan urutan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia berarti bahwa ruang publik secara virtual dapat menjadi garda terdepan dalam komunikasi dan membawa peran besar dalam menggiring opini masyarakat.

Kecepatan dalam mengakses dan menyebarkan berbagai informasi melalui internet oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja membuat masyarakat lebih menggemari media yang disajikan secara *online* daripada media cetak yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mendistribusikan informasi. Kemudahan dalam menyebarkan dan mengakses informasi ini mengakibatkan banyak berita yang disajikan di internet yang mengandung kebohongan, kepalsuan dan ketidakjelasan. Hoaks adalah sebutan dari informasi yang tidak benar dan belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam suatu informasi (Assidik, 2018). Saat ini, masih banyak beredar berita hoaks di media *online* mengenai COVID-19 maupun vaksin COVID-19.

Tabel 1.1 Sebaran Konten Hoaks COVID-19 periode 23 Januari 2020 – 11 Januari 2022

| Temuan isu hoaks COVID-19 | Media sosial | Total | Diajukan | Tindaklanjut (takedown) | Sedang ditindaklanjuti |
|---------------------------|--------------|-------|----------|-------------------------|------------------------|
| 2.060                     | Facebook     | 4.670 | 4.670    | 4.530                   | 140                    |
|                           | Instagram    | 49    | 49       | 39                      | 10                     |
|                           | Twitter      | 572   | 572      | 561                     | 11                     |
|                           | Youtube      | 55    | 55       | 54                      | 1                      |
|                           | Tiktok       | 25    | 25       | 11                      | 14                     |
|                           | Total        | 5.371 | 5.371    | 5.195                   | 176                    |

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai penanganan sebaran konten hoaks COVID-19 pada periode 23 Januari 2020 hingga 11 Januari 2022, diketahui bahwa terdapat

2.060 hoaks terkait COVID-19, total 5.371 penyebaran melalui media sosial, total 5.371 penyebaran telah diajukan, total 5.195 telah ditindaklanjuti dan total 176 sedang ditindaklanjuti. Selain itu, diketahui juga melalui data ini, media sosial yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah Facebook, kemudian Twitter, Youtube, Instagram dan yang paling sedikit digunakan dalam penyebaran hoaks adalah Tiktok.

Tabel 1.2 Sebaran Konten Hoaks Vaksin COVID-19 periode 11 Januari 2022

| Temuan hoaks vaksin COVID-19 | Media sosial | Sebaran | Takedown |
|------------------------------|--------------|---------|----------|
| 434                          | Facebook     | 2.345   | 2.345    |
|                              | Instagram    | 18      | 18       |
|                              | Twitter      | 110     | 110      |
|                              | Youtube      | 43      | 43       |
|                              | Tiktok       | 21      | 21       |
|                              | Total        | 2.537   | 2.537    |

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2022)

Tabel 1.2 mengenai penanganan sebaran konten hoaks vaksin COVID-19 per 11 Januari 2022 mencatat bahwa terdapat 434 hoaks yang membahas terkait vaksin COVID-19, dengan total 2.345 penyebaran melalui media sosial dan total 2.345 telah ditindaklanjuti. Jumlah ini terus meningkat setiap harinya.

Berita atau informasi yang ada di media *online* tidak dibatasi oleh ruang (Nurkinan, 2017). Dibutuhkan kesadaran dalam melakukan penyebaran informasi. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi, masyarakat akan mudah mempercayai informasi yang belum valid kebenarannya dan dapat menimbulkan masalah hukum bagi para penulis maupun masyarakat yang menyebarkan kesalahan informasi tersebut (Kominfo, 2017).

Petisi merupakan salah satu ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan tertentu. Linder & Riehm, (2009) mendefinisikan sebuah petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, seperti institusi pemerintahan atau parlemen, dan juga korporasi swasta. Petisi memiliki peluang besar untuk menjadi ruang partisipasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital, menjadikan petisi *online* sebagai bentuk baru dari petisi konvensional. Petisi *online* sendiri merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah secara daring supaya pemerintah melakukan suatu tindakan tertentu (Simamora, 2017).

Di Indonesia, petisi *online* sudah sering digunakan masyarakat untuk menyuarakan ataupun mendukung suatu pendapat. Salah satu platform petisi *online* yang telah berkontribusi terhadap perubahan baik dalam skala global maupun lokal adalah Change.org. Platform Change.org memberi wadah dimana siapa saja dan dimana saja bisa memberikan pendapat tentang suatu masalah dalam pemerintahan sehingga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan yang terjadi (Syahril, 2018). Change.org di Indonesia telah berperan dalam mendukung keberhasilan advokasi kebijakan dan tidak sedikit petisi *online* pada platform tersebut telah berhasil membawa perubahan dalam masyarakat (Hamid, 2015).

Cara kerja dari platform petisi *online* Change.org diawali oleh pembuat petisi yang menyampaikan keresahannya terhadap suatu masalah publik secara deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyebarkan petisi tersebut secara *online* melalui

media sosial atau media *online* lainnya guna mengumpulkan dukungan untuk menandatangani petisi tersebut. Kemudian, tanda tangan dari pendukung petisi akan secara otomatis dikirimkan melalui *e-mail* kepada target petisi yang dituju yaitu pembuat kebijakan. Karena meningkatnya masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia, maka penggunaan media sosial dan media *online* sangat membawa keuntungan diantaranya sebagai sarana kampanye untuk mendukung dan menandatangani suatu petisi di Change.org, serta dapat digunakan untuk memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama dengan pembuat petisi.

Petisi *online* menyediakan bentuk sederhana dari petisi tradisional atau konvensional untuk mengajukan petisi dan memperoleh dukungan lebih luas dan dengan mudah tanpa terbatas oleh biaya, jarak dan waktu. Masyarakat dengan bebas membuat petisi dan menandatanganinya dengan pemikiran masing-masing individu tersebut. Petisi *online* dinilai sebagai bentuk dari ketidaksetujuan atas fenomena yang terjadi dan disebar luaskan melalui media sosial lain. Semakin banyak dukungan yang didapat maka akan dianggap semakin kuat juga argumen untuk melakukan protes dan penolakan sebagai representasi dari sekelompok orang tertentu

Para pembuat petisi baik perorangan maupun organisasi menggunakan petisi untuk berpartisipasi dalam suatu kebijakan dengan menyampaikan aspirasinya. Aspirasi tersebut diharapkan dapat memperoleh perhatian dan dukungan sasaran yaitu masyarakat agar dapat mencapai kemenangan yang bertujuan untuk mengubah persepsi dari para elit pembuat kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi publik (Taufiqurrohman et al., 2021).

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Petisi sebagai alat yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah memiliki peranan penting dalam kasus ini. Pada platform petisi *online* Change.org di Indonesia, per 23 November 2021 terdapat 33 petisi yang membahas mengenai vaksin COVID-19 sebagai topik utama maupun bukan sebagai topik utama dengan kata kunci pencarian “vaksin COVID-19”. Setiap petisi berisikan tentang opini yang berbeda-beda yang menyangkut dan menyinggung program dan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah Tabel 1.3 mengenai Karakteristik Petisi dan Isi Pesan Kebijakan pada petisi *online* Change.org periode 2020 hingga 2021.

Tabel 1.3 Karakteristik Petisi dan Isi Pesan Kebijakan

| Karakteristik Petisi                                            | Jumlah | %     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Pro kebijakan pemerintah                                        | 6      | 10,9% |
| Kontra kebijakan pemerintah                                     | 12     | 21,8% |
| Tidak membahas vaksin sebagai topik utama                       | 15     | 27,3% |
| Total                                                           | 33     | 100%  |
| Isi Pesan Kebijakan                                             | Jumlah | %     |
| Memperluas persebaran vaksin                                    | 4      | 7,3%  |
| Mengajak untuk vaksin                                           | 2      | 3,6%  |
| Vaksin buatan Indonesia (Vaksin Nusantara)                      | 6      | 10,9% |
| Membatalkan adanya program vaksinasi mandiri atau gotong royong | 5      | 9,1%  |
| Vaksin sebagai persyaratan penerbangan                          | 4      | 7,3%  |
| Transparansi vaksin COVID-19 sebelum diberikan                  | 1      | 1,8%  |

Lanjutan

Tabel 1.3 Karakteristik Petisi dan Isi Pesan Kebijakan

| Isi Pesan Kebijakan                                             | Jumlah | %    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| Membatalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi            | 1      | 1,8% |
| Kartu penyintas COVID-19 sebagai pengganti kartu vaksin         | 1      | 1,8% |
| Menginginkan jenis vaksin pilihan                               | 1      | 1,8% |
| Menghentikan sementara paten dan HAKI vaksin COVID-19           | 1      | 1,8% |
| Menolak vaksin sebagai syarat tatap muka                        | 2      | 3,6% |
| Meningkatkan pelayanan Pedulilindungi terkait sertifikat vaksin | 2      | 3,6% |
| Total                                                           | 33     | 100% |

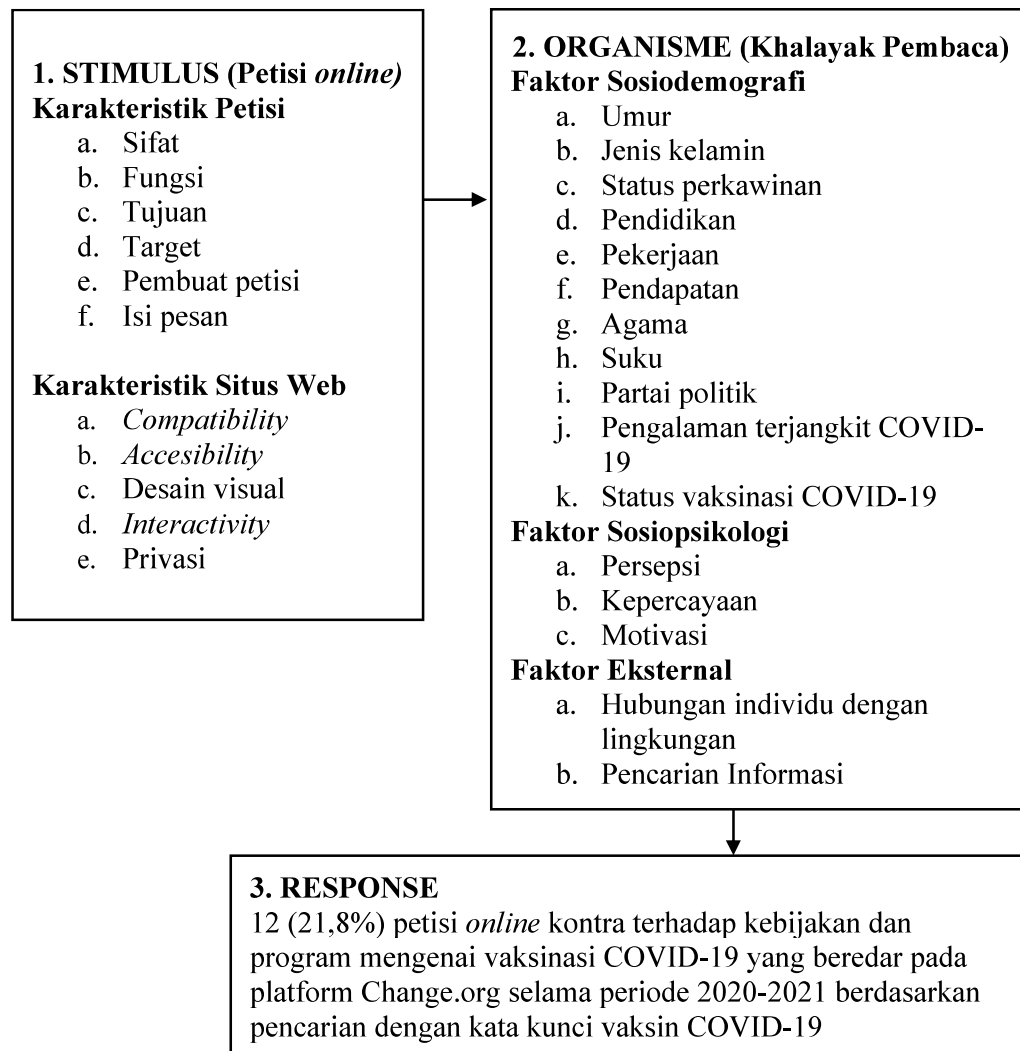
Sumber : Petisi *Online Change.Org* Periode 2020-2021

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa petisi yang kontra (21,8%) dengan kebijakan pemerintah lebih banyak dari petisi yang pro (10,9%) terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian, terdapat beberapa isu yang paling banyak menarik perhatian masyarakat yaitu mengenai vaksin buatan Indonesia yaitu Vaksin Nusantara sebanyak 6 petisi (10,9%), program vaksinasi mandiri atau gotong royong sebanyak 5 petisi (9,1%), memperluas persebaran vaksin sebanyak 4 petisi (7,3%), dan vaksin sebagai persyaratan penerbangan sebanyak 4 petisi (7,3%). utama.

Berdasarkan Tabel 1.3, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdapat 12 (21,8%) petisi *online* kontra terhadap kebijakan dan program mengenai vaksinasi COVID-19 yang beredar pada platform Change.org selama periode 2020-2021 berdasarkan pencarian dengan kata kunci vaksin COVID-19.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, 12 (21,8%) petisi *online* kontra terhadap kebijakan dan program mengenai vaksinasi COVID-19 yang beredar pada platform Change.org selama periode 2020-2021 berdasarkan pencarian dengan kata kunci vaksin COVID-19 dapat diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa 12 (21,8%) petisi *online* kontra terhadap kebijakan dan program mengenai vaksinasi COVID-19 yang

beredar pada platform Change.org selama periode 2020-2021 berdasarkan pencarian dengan kata kunci vaksin COVID-19 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi karakteristik petisi yang didalamnya terdapat sifat, fungsi, tujuan, target, pembuat petisi dan isi pesan serta karakteristik situs web yang didalamnya terdapat *compatibility*, *accessibility*, desain visual, *interactivity* dan privasi pada stimulus yaitu petisi *online*. Organisme yaitu khalayak pembaca atau pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19 memiliki beberapa faktor didalamnya yaitu yang pertama adalah faktor sosiodemografi meliputi variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, partai politik, pengalaman terjangkit COVID-19 dan status vaksinasi COVID-19, yang kedua adalah faktor sosiopsikologi meliputi variabel persepsi, kepercayaan dan motivasi, kemudian yang ketiga adalah faktor eksternal meliputi variabel pencarian informasi.

Seiring dengan adanya kemajuan peradaban dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan penggunaan internet, maka terdapat banyak cara untuk mengemukakan pendapat, melakukan protes, dan penyampaian aspirasi pada petisi *online* dapat untuk menampung keluhan atau pengaduan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga, mengupayakan perubahan atau pembuatan kebijakan, membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target petisi yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan ketiga provinsi yang memiliki kontribusi pengguna internet paling tinggi dibandingkan wilayah di bagian Indonesia lainnya berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019-2020. Tingginya

pengguna internet pada ketiga provinsi tersebut dapat menandakan bahwa banyaknya pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19 berasal dari ketiga provinsi tersebut. Didukung dengan penelitian Putri (2020) yang mengatakan bahwa petisi *online* sebagai salah satu bentuk aksi kolektif memiliki hubungan dengan penggunaan internet di Indonesia.

### **1.3 Pembatasan Penelitian dan Perumusan Masalah**

#### **1.3.1 Pembatasan Penelitian**

Agar lebih terarahnya skripsi dan permasalahan tidak melebar, maka peneliti membatasi penelitian dengan fokus kepada organisme (faktor sosiodemografi, faktor sosiopsikologi dan faktor eksternal) serta respon yang diberikan oleh organisme tersebut. Hal ini disebabkan karena penelitian hanya menjangkau responden sebagai khalayak pembaca atau pengguna petisi *online* mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.

#### **1.3.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran faktor sosiodemografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, partai politik, pengalaman terjangkit COVID-19, dan status vaksinasi COVID-19) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai vaksinasi kebijakan COVID-19?
2. Bagaimana gambaran faktor sosiopsikologi (persepsi, kepercayaan, dan motivasi) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19?

3. Bagaimana gambaran faktor eksternal (pencarian informasi) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat (tanda tangan) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19?
5. Apakah terdapat pengaruh faktor sosiodemografi, faktor sosiopsikologi, dan faktor eksternal terhadap keterlibatan masyarakat (tanda tangan) pada petisi *online* mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

##### a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 pada petisi *online*.

##### b. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi gambaran faktor sosiodemografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, partai politik, pengalaman terjangkit COVID-19, dan status vaksinasi COVID-19) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.
2. Mengidentifikasi gambaran faktor sosiopsikologi (persepsi, kepercayaan, dan motivasi) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.
3. Mengidentifikasi gambaran faktor eksternal (pencarian informasi) pengguna petisi *online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.
4. Mengidentifikasi keterlibatan masyarakat (tanda tangan) pengguna petisi

*online* yang membahas mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.

5. Menganalisis pengaruh faktor sosiodemografi, faktor sosiopsikologi, dan faktor eksternal terhadap keterlibatan masyarakat (tanda tangan) pada petisi *online* mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mempraktekkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

- b. Bagi pembaca

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan maupun sumber bacaan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19 pada petisi *online*

- c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mulai dari presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif dalam mengevaluasi implementasi kebijakan dan program vaksinasi COVID-19. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait kebijakan dan program vaksinasi COVID-19.

d. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Penelitian ini bermanfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga khususnya dalam rangka menambah bahan bacaan ilmiah di ruang baca Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta perpustakaan Universitas Airlangga.